BPJPH Temukan 9 Produk Pangan .....

Dari Halaman 1

diketahui tidak halal setelah dibuktikan melalui pengujian laboratorium untuk parameter uji DNA dan/atau peptida spesifik porcine.

"Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia," jelasnya.

Dari 9 produk yang terbukti tidak halal itu, ada 7 produk yang sudah bersertifikat halal, dan 2 produk yang tidak bersertifikat halal. BPJPH pun bakal memberikan sanksi kepada produsen.

Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal.

"Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, dan PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan," pungkasnya**.(cnni/js)**

Israel Bohongi Publik .....

Dari Halaman 1

serta keputusan keliru di lapangan. Mayor Jenderal (Cadangan) Yoav Har-Even, pemimpin investigasi, mengakui telah terjadi kesalahan, namun menyangkal bahwa ini adalah praktik umum.

Menurut data dari PBB dan tim penyelamat Palestina, korban terdiri dari 8 staf Bulan Sabit Merah, 6 anggota badan penyelamat sipil Gaza, dan 1 staf UNRWA. Jenazah mereka baru ditemukan seminggu kemudian, terkubur bersama kendaraan mereka di pasir Tal al-Sultan, Rafah. PBB menyebut lokasi itu sebagai "kuburan massal".

Presiden Bulan Sabit Merah di Tepi Barat, Younis al-Khatib, mengatakan hasil autopsi menunjukkan semua korban ditembak di bagian atas tubuh, mengarah pada niat untuk membunuh. Tuduhan ini dibantah oleh militer Israel.

Mereka bersikeras tidak ada korban yang dieksekusi atau diborgol, dan menyatakan bahwa penembakan dilakukan untuk merespons ancaman nyata. Mereka juga mengklaim enam dari korban kemudian diidentifikasi sebagai anggota Hamas, meski tidak ditemukan senjata di tubuh para korban.

Laporan juga mencatat bahwa setelah insiden, militer menyebut kendaraan korban tampak mencurigakan dan melaju tanpa lampu. Namun, rekaman video dari ponsel salah satu korban menunjukkan ambulans berjalan dengan lampu menyala dan sirene aktif, bertolak belakang dengan klaim militer.

Militer mengakui adanya kegagalan pelaporan, tapi menolak tuduhan upaya menutup-nutupi kejadian tersebut. "Kami tidak berbohong," kata juru bicara militer, Effie Defrin.

Namun, Farsakh mengungkapkan bahwa pihaknya dilarang mengakses lokasi selama lima hari setelah kejadian. Sementara itu, seorang petugas medis selamat namun ditahan oleh militer Israel tanpa penjelasan jelas. "Jika ini benar-benar kesalahan, mengapa paramedisnya masih ditahan?" ujarnya.

Menurut militer, ada tiga insiden penembakan hari itu. Salah satunya menyasar kendaraan PBB karena "kesalahan operasional". PBB mencatat bahwa tim penyelamat yang mencari rekan-rekannya juga diserang satu per satu selama beberapa jam setelahnya**.(cnni/js)**

Ojol Bakal Demo Besar 20 Mei .....

Dari Halaman 1

portasi dan Jasa Daring Indonesia Raden Igun Wicaksono mengurai pertama para ojol dan kurol meminta dibuatkan payung hukum, serta menuntut pemerintah untuk menertibkan regulasi yang ditetapkan oleh perusahaan.

"Lalu revisipotongan biaya aplikasi bagi ojol dan kurol maksimal 10 persen, tertibkan regulasi tarif ojol dan kurol, hapuskan aceng, slot, double order," ujar Igun dalam pernyataan resmi dikutip Senin (21/4).

Igun juga menegaskan ojol dan kurol sepakat mogok kerja selama aksi besar berlangsung hingga dua hari hari pasca aksi.

"Kami juga akan lumpuhkan aplikasi mereka menjelang aksi serentak 20 Mei 2025 dengan offbid massal seluruh Indonesia dimulai dua hari menjelang aksi demo serentak dan 2 hari pasca aksi demo serentak," ucapnya.

Igun pun meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perlindungan atas adanya kemungkinan ancaman dari perusahaan kepada para ojol-kurol yang ikut aksi.

"Kecuali Presiden, pemerintah, dan negara tidak menanggapi dengan tegas dan komprehensif maka dapat dipastikan ojol dan kurol seluruh Indonesia akan memberontak keras dan brutal terhadap perusahaan-perusahaan platform aplikator asing beserta para ojol dan kurol binaan mereka," kata Igun.

Igun menambahkan aksi ini akan dibuat bergelombang pada April dan Mei 2025. Namun puncak dari protes ini bakal digelar serentak di kota-kota besar Indonesia, terutama Istana Negara pada 20 Mei 2025**.(cnni/js)**

Jangan Ada Matahari Kembar .....

Dari Halaman 1

kembar. Artinya kalau tidak ada matahari kembar itu jangan sampai kita berpikir ada yang lain selain Bapak Prabowo saat ini," kata Dede di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/4).

Kendati demikian, Dede enggan berkomentar banyak terkait isu matahari kembar yang muncul imbas sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menyambangi kediaman Presiden ke-7 Jokowi selama Idul Fitri 2025.

Ia menilai peristiwa itu wajar dilakukan dalam rangka silaturahmi antara politisi-politisi senior di pemerintahan kepada Jokowi.

"Sebetulnya sowan kemana saja boleh kan? Apalagi sebagai senior-senior di pemerintahan saya rasa wajar kalau saling sowan," ujar dia.

Namun, ia menegaskan dalam pemerintahan Presiden Prabowo saat ini tidak boleh ada matahari kembar sesuai amanat dari SBY.

"Tetapi sekali lagi saya hanya menyadur dari pernyataan Bapak SBY. Saat ini di pemerintahan ya hanya Bapak, Pak Prabowo," ujar dia.

Isu matahari kembar sempat mencuat dalam pemerintah Prabowo-Gibran seiring banyak menteri yang melakukan kunjungan ke kediaman Jokowi di Solo.

Namun, Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi juga membantah isu matahari kembar.

Menteri Sekretaris Negara itu menegaskan kunjungan yang dilakukan tersebut merupakan hal yang normal dan wajar. Terlebih, kata dia, kunjungan itu terjadi masih dalam periode dan suasana lebaran.

"Sebagai Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang menjabat dua periode, ya dalam suasana lebaran wajar-wajar saja bersilaturahmi," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/4).

Jokowi Angkat Bicara

Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai isu matahari kembar yang mencuat belakangan ini. Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menampik tuduhan adanya dualisme kepemimpinan di pemerintahan itu.

Jokowi menegaskan kepemimpinan nasional saat ini dipegang oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Mengenai matahari kembar, enggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sudah jelas," kata Jokowi, saat ditemui di kediamannya, Senin.

Jokowi mengatakan kunjungan para menteri tersebut sebagai hal yang lumrah. Apalagi kunjungan tersebut dilakukan di suasana Lebaran.

"Apa yang salah (dari kunjungan para menteri)? Silaturahmi di hari lebaran kan sangat baik, kepada siapa pun ya," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi memastikan hubungannya dengan Presiden Prabowo masih terjalin baik. Meski tak sempat menghadiri Open House di Istana Kepresidenan pada Idulfitri 2025, Jokowi memastikan ia sudah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo.

"Oh sudah (komunikasi). Hari lebaran, hari pertama itu video call nggak lama dengan beliau," kata Jokowi.

Tak hanya Presiden Prabowo, Jokowi juga menghubungi tokoh-tokoh lain untuk mengucapkan selamat Lebaran.

"Pak Ma'ruf Amin juga, Pak Presiden Prabowo juga," kata Jokowi**.(cnni/js)**

Kemenkes Terima 2.621 Laporan soal PPDS .....

Dari Halaman 1

2.621," ujar Inspektur Jenderal Kemenkes Murti Utami dalam konferensi pers di kantor Kemenkes, Jakarta, Senin (21/4).

Ia menjelaskan dari ribuan laporan itu yang masuk kategori perundungan sebanyak 620 laporan.

"Secara spesifik pemerkosaan tidak ada, tapi memang ada pelaporan pelecehan seksual dari peserta PPDS. Itu ada 3 laporan yang sudah masuk dan sudah kita tindak lanjuti," ungkap Murti.

Sementara itu, dari 620 laporan perundungan yang masuk, tempat kejadian perkara atau locus berada di Rumah Sakit Vertikal Kemenkes sebanyak 363 laporan. Sedangkan di luar Rumah Sakit Vertikal ada 257 laporan.

"257 ini biasanya saya berkolaborasi dengan ibu Irjen Kemendikti Saintek untuk locus-locusnya di mana," kata Murti.

Dari laporan-laporan yang sudah ditindaklanjuti, terdapat rekomendasi untuk menghentikan program studi di tiga tempat, yakni di RS Kariyadi Semarang, RS Kandaou Manado dan RSHS Bandung.

"Ada tiga yang kita hentikan dan sampai saat ini kita tetap evaluasi. Jadi, teman-teman sekalian, tadi kita mendengarkan pak Dirut RSHS, pak Rektor (UNPAD) ya, apa yang mereka akan lakukan, dan ini mereka sudah tuangkan di dalam action plan perbaikan mereka," ucap Murti.

"Action plan ini akan kami monitoring, akan kami evaluasi bersama ibu Catarina, ibu Itjen Kemendikti Saintek," tandasnya**.(cnni/js)**

RUU Kejaksaan dan Polri Bakal .....

Dari Halaman 1

Ketua Komisi III Janji RUU KUHAP Dibahas Terbuka di Gedung DPR

Prasetyo juga membantah apabila RUU Polri akan membuat lembaga tersebut semakin super power. Sebab, kata dia, sampai saat ini kedua RUU itu masih belum dibahas.

"Super power-nya di mana, wong kita isinya belum kita bahas kok," katanya.

Sebelumnya RUU Polri masuk dalam daftar RUU yang kini menjadi sorotan koalisi masyarakat sipil usai pengesahan RUU TNI beberapa waktu lalu. Meski begitu, RUU tersebut hingga kini belum resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas dan siap dibahas DPR.

Di periode DPR sebelumnya, RUU Polri menjadi sorotan terutama menyangkut soal wacana penambahan wewenang Polri untuk melakukan penyadapan dan kerja intelijen**.**
(cnni/js)

Indonesia - China Bahas Peningkatan Kerja Sama .....

Dari Halaman 1

peningkatan komunikasi dan pemahaman bersama antarnegara.

"Indonesia memandang forum ini sebagai platform strategis yang tidak hanya memperkuat kemitraan bilateral, tetapi juga meningkatkan komunikasi, saling pengertian, dan kepercayaan antara kedua negara," jelasnya.

Sjafrie juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah masing-masing negara dalam kerjasama yang ada.

Sjafrie kemudian mendorong adanya penguatan kerja sama yang konkret dan inklusif, khususnya di bidang pertahanan, guna mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan.

"Indonesia meningkatkan kerja sama dalam konteks comprehensive and strategic partnership dengan Republik Rakyat Tiongkok di bidang pertahanan," tuturnya.

Lebih lanjut, Sjafrie berharap usai adanya pertemuan itu kerja sama strategis bilateral dapat semakin ditingkatkan. Ia lantas menekankan pentingnya peningkatan pertukaran personel militer di level tingkat tinggi, pelatihan bersama, dan kolaborasi praktis antar angkatan bersenjata, serta kerja sama industri pertahanan.

"Kami berharap agar dialog ini menghasilkan langkah konkret yang memperkuat kerja sama strategis Indonesia - RRT di bidang pertahanan," jelasnya.

Turut hadir dalam pertemuan itu yakni Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiyono, Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi, dan Menteri Pertahanan Nasional RRT Laksamana Dong Jun**.(cnni/js)**

LIPPSU Laporkan Oknum Anggota Dewan.....

Dari Halaman 1

dari APBD Kota Medan Tahun Anggatan 2024-2025," ungkap Azhari Sinik.

Untuk itu ia berharap kepada Kejari Medan segera menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut.

Dugaan Pembegalan Anggaran

"Kita menduga ada pembegalan belanja anggaran Sosperda yang dilaksanakan Anggota DPRD Kota Medan Roma Uli Silalahi. Karena dalam aturan DPRD, satu Sosperda diasumsikan menggunakan anggaran sekitar Rp120 juta per bulan dengan 2 kali kegiatan, yang ditampung dalam APBD Kota Medan 2025. Sementara, kegiatan ini diadakan beberapa kali di lokasi yang sama dan dengan jumlah peserta yang minim," ujar Azhari Sinik, Kamis (3/4/2025).

Ia juga menyoroti ketidaksesuaian prosedur Sosperda dengan regulasi yang digelar Anggota DPRD dari Fraksi PKB tersebut.

"Seharusnya, dalam satu kegiatan minimal dihadiri 500 orang, bukan hanya 100 atau 150 peserta. Selain itu, tidak boleh ada pembagian uang atau beras dalam Sosperda. Jika ini terjadi, berarti ada dugaan pelanggaran gratifikasi kepada masyarakat yang harus diusut oleh aparat penegak hukum," tegasnya.

Ia juga menyinggung mekanisme pelaporan peserta yang mencakup daftar hadir, konsumsi, hingga honor narasumber dan akomodasi lainnya.

"Dalam aturan keuangan daerah, biaya konsumsi satu peserta Rp45 ribu per paket, sementara narasumber mendapat honor Rp750 ribu, tambah lagi biaya akomodasi, peralatan acara. Jika pesertanya hanya sedikit, ke mana sisa anggaran ini? Apalagi jika narasumber tidak dihadrkan," tandasnya, seraya menyebutkan, kondisi ini juga diduga terjadi pada anggota dewan lainnya**.(A-10)**

Hidayah

Mempermainkan Sertifikat Halal

Dari Halaman 1

kesalahan teknis. Ini adalah persoalan etik dan hukum. Ketika produsen mencantumkan label halal, maka mereka telah membuat janji kepada konsumen Muslim bahwa produk mereka bebas dari unsur haram. Ketika janji itu dilanggar, apalagi dengan unsur sensitif seperti babi, maka kepercayaan publik langsung runtuh.

Pertanyaannya, bagaimana bisa produk bersertifikat halal mengandung unsur babi? Apakah sistem pengawasan yang longgar? Apakah proses sertifikasi tidak dilakukan dengan ketat? Atau justru ada pelaku usaha yang dengan sengaja memalsukan atau menyembunyikan kandungan produk demi keuntungan?

Sudah saatnya sistem sertifikasi dan pengawasan produk halal dievaluasi secara menyeluruh. Badan sertifikasi tidak hanya bertugas memberi label, tetapi juga harus aktif melakukan pengawasan berkala dan audit acak. Pelaku usaha yang terbukti menyalahgunakan label halal harus dikenai sanksi tegas: pencabutan sertifikat, denda, bahkan proses pidana jika terbukti menipu publik.

Di sisi lain, konsumen juga harus lebih kritis. Jangan mudah percaya hanya karena ada logo halal. Periksa komposisi, cari tahu asal produk, dan berani melaporkan jika ada kecurigaan. Literasi halal perlu ditingkatkan, agar masyarakat tidak menjadi korban janji palsu kemasan.

Kasus "halal rasa babi" ini menjadi alarm bahwa kejujuran dalam bisnis makanan bukan hanya soal reputasi, tapi juga menyangkut hak spiritual dan psikologis konsumen. Jika label halal tidak bisa dipercaya, maka apa lagi yang bisa dipercaya dari produk yang kita konsumsi setiap hari?

Kita juga perlu mempertanyakan integritas pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produknya. Dalam dunia bisnis yang kian kompetitif, tak sedikit oknum yang memilih jalan pintas demi mengejar keuntungan semata. Mereka menganggap label halal sebagai strategi pemasaran, bukan sebagai komitmen terhadap nilai-nilai yang dipegang mayoritas konsumennya. Padahal, dalam Islam, kejujuran dalam berdagang bukan hanya tuntutan moral, tapi juga bagian dari ibadah.

Di sinilah urgensi kolaborasi antar lembaga—BPJPH, BPOM, MUI, dan pemerintah daerah—untuk saling memperkuat peran. Tidak cukup hanya mengeluarkan sertifikat halal lalu melepaskan tanggung jawab. Mekanisme audit lapangan dan pengujian berkala terhadap produk bersertifikat harus menjadi standar. Tidak boleh ada celah untuk permainan curang yang mengorbankan konsumen.

Lebih jauh lagi, dunia pendidikan dan media juga perlu mengambil peran. Edukasi tentang halal tidak boleh hanya berhenti pada label dan simbol, tapi harus masuk ke kesadaran konsumen tentang pentingnya proses, bahan baku, dan asal-usul produk. Masyarakat yang sadar dan kritis adalah benteng terbaik terhadap penipuan industri pangan.

Akhirnya, menjaga kehalalan produk bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga tertentu. Ini adalah tanggung jawab bersama—pelaku usaha, regulator, akademisi, dan masyarakat sipil. Kasus ini harus menjadi momentum introspeksi dan reformasi. Sebab kepercayaan publik, sekali rusak, tak mudah pulih. Dan dalam konteks halal, yang rusak bukan hanya kepercayaan, tapi juga keyakinan.